


## KATA PENGANTAR

*P*uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan Hidayah-Nya **Rencana Kerja** Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disepakati, untuk dijadikan pedoman kerja tahunan guna mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Rencana Kerja Tahun 2022 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Secara umum, Rencana Kerja Tahun 2022 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat serta perubahan-perubahan Program-program kegiatan yang telah disesuaikan dan akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rencana Kerja (*Performance Plan*) 2022 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia* dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Provinsi Jambi*.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman menyusun kegiatan prioritas Dinas Kehutanan tahun 2022.

Jambi, Januari 2022  
**KEPALA DINAS**  
  
**AKHMAD BESTARI, S.H.,M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197405081999031004

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	i
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>		
1. Latar Belakang	.....	1
2. Landasan Hukum	.....	3
3. Maksud dan Tujuan	.....	5
4. Sistematika Penulisan	.....	6
 <b>BAB II : HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022</b>		
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022	.....	7
2. Analisis Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	.....	42
3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	.....	43
4. Rancangan Awal RKPD	.....	44
 <b>BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>		
1. Telaahan Terhadap Kebijakan	.....	49
2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	.....	51
 <b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022</b>		
1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022	.....	55
 <b>BAB V : PENUTUP</b>	.....	73
<b>LAMPIRAN</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan instansi daerah Provinsi Jambi yang mengurus bidang kehutanan. Potensi sumber daya hutan merupakan bagian dari lingkungan hidup yang sangat vital untuk dipertahankan keberadaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian. Secara garis besar hutan mempunyai fungsi ekologi, fungsi produksi dan fungsi sosial. Agar memperoleh manfaat dari fungsi tersebut, hutan harus dikelola dengan arif dan bijaksana.

Semakin disadari bahwa kelestarian sumber daya hutan merupakan aset dan modal dasar bagi pembangunan Provinsi Jambi. Lebih jauh bahwa upaya pelestarian sumber daya hutan bukanlah hanya demi kelestarian hutan atau alam itu sendiri, namun hakekatnya adalah untuk kelangsungan pembangunan bangsa dan kesejahteraan manusia. Melihat kecenderungan global dengan berbagai isu strategis baik pada tataran lokal, nasional bahkan internasional bahwa keberadaan hutan dengan berbagai aspeknya pada masa yang akan datang tetap merupakan suatu pilihan.

Seirama dengan adanya pergeseran strategi pembangunan Kehutanan dari *conventional forestry* menuju *Forest Resource and community based Management*. Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Provinsi Jambi* telah menempatkan program optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam berbasis lingkungan dan rendah karbon dalam mendukung dan menggerakkan perekonomian daerah.

Jambi sebagai salah satu provinsi yang kaya akan potensi alam dengan panorama yang indah dan unik serta kelengkapan diversitas potensi alam juga melengkapi khasanah alam Jambi dengan semboyan “*Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah*”. Namun khasanah sumberdaya hutan di Provinsi Jambi tentunya menyimpan tantangan pada berbagai tahapan pengelolaannya. Keadaan ini tentunya perlu disikapi secara bijaksana sehingga upaya untuk mencapai kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat menjadi suatu kenyataan. Permasalahan dan dinamika dalam suatu pengelolaan hutan hendaknya menghantarkan pada suatu kesadaran dan penyadaran tentang pentingnya kelestarian sumberdaya hutan.

Luas kawasan hutan di Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.863/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 adalah  $\pm 2.098.535,00$  Ha atau  $\pm 42,98$  % dari luas daratan di Provinsi Jambi.

Pembagian kawasan hutan di Provinsi Jambi terdiri dari :

a.	Hutan Produksi Terbatas	$\pm 258.285,00$ Ha
b.	Hutan Produksi Tetap	$\pm 963.792,00$ Ha
c.	Hutan Produksi Konversi	$\pm 11.399,00$ Ha
d.	Hutan Lindung	$\pm 179.588,00$ Ha
e.	Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam	$\pm 685.471,00$ Ha

## **2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019
- i. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 - 2033 (Lembar Daerah Pemerintah provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021;
- o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembar Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah provinsi Jambi Nomor 8);
- p. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- q. Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- r. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Taman Hutan Raya pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

### **3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah :

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024.
- c. Penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

### **4. Sistematika Penulisan**

Didalam penulisan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2022**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

#### **BAB III TUJUAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

- 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kehutanan**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dijadikan sebagai substansi pengukuran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 . Evaluasi diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi pada kelompok Belanja Langsung.

#### **2.2. Pencapaian Kinerja program /Kegiatan Tahun 2022**

Pada tahun 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran APBD Murni sebesar Rp 82.824.955.278,- yang diarahkan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan 133 (seratus tiga puluh tiga) sub kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Sisi keuangan sampai dengan akhir semester 1 (Januari s/d Juli 2022) terealisasi sebesar Rp. 33.518.396.337 (keuangan 40,47%) (fisik 42,69%).

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melaksanakan 133 **Sub kegiatan** dari 21 **kegiatan** dalam **5 Program** untuk memenuhi Kebijakan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi. Terhadap masing-masing program dan kegiatan tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

##### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintah**

**Program Penunjang Urusan Pemerintah** memiliki 6 (Enam) kegiatan bertujuan agar optimalisasi dalam pelayanan, total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 4.475.026.190,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2022. Realisasi sampai

dengan akhir Bulan Juni 2022 Rp. 46.211.239.074,- atau sebesar 83,59 % sedangkan realisasi fisik 85,87 %.

**1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 389.226.900,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 138.557.218,- atau 35,60% dengan realisasi fisik sebesar 46,83%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan terlaksananya penyusunan laporan keuangan berupa RKA, RKA-P, LKPJ, LKP dan laporan keuangan lainnya dan monitoring kegiatan bidang kehutanan di 11 KPHP/KPHL di Provinsi Jambi.

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 576.365.400,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 313.696.684,- atau 54,43% dengan realisasi fisik sebesar 60,33%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan pemenuhan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN untuk mendukung tertib administrasi dan pengelola keuangan, sesuai target kinerja sepanjang tahun 2022.

**3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 421.966.080,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 214.901.520,- atau 50,93% dengan realisasi fisik sebesar 51,78%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan agar kinerja Aparatur instansi /OPD meningkat dan menjadi makin baik, berkualitas dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

**4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 691.804.250,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 277.005.784,- atau 40,04% dengan realisasi

fisik sebesar 47,87%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan agar kinerja Aparatur instansi /OPD meningkat dan menjadi makin baik, berkualitas dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

**5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 952.217.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 357.894.510,- atau 37,59% dengan realisasi fisik sebesar 46,49%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan agar kinerja Aparatur instansi/OPD meningkat dan menjadi baik, berkualitas dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

**6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.443.445.760,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 471.000.000,- atau 32,63% dengan realisasi fisik sebesar 32,63%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan tujuan agar kinerja Aparatur instansi/OPD meningkat dan menjadi baik, berkualitas dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

**7. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Kerinci)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 54.684.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp.32.870.546,- atau 60,11% dengan realisasi fisik sebesar 62,04%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Kerinci Unit 1 dengan tujuan agar penyediaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

#### **8. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bungo)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 54.684.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp.32.937.944,- atau 60,23% dengan realisasi fisik sebesar 60,23%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Bungo Unit II dan III dengan tujuan agar penyediaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar dan diharapkan dapat memenuhi pelayanan administrasi perkantoran.

#### **9. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Merangin)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 54.684.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 30.738.700,- atau 56,21% dengan realisasi fisik sebesar 61,07%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI bertujuan menyelenggarakan dan memberikan suatu pelayanan administrasi perkantoran dalam pelaksanaan rutin kantor sehari-hari secara tertib.

#### **10. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Hulu Sarolangun)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 72.869.600,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 27.755.700,- atau 38,09% dengan realisasi fisik sebesar 62,21%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun bertujuan agar penyediaan kebutuhan administrasi di perkantoran UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

#### **11. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Hilir Sarolangun)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 54.684.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 24.138.055,- atau 44,14% dengan realisasi fisik sebesar 54,81%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir

Sarolangun bertujuan agar terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran yaitu pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit dibidang ke tata usahaan meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, perlengkapan serta peralatan kantor.

#### **12. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tebo Barat)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 54.684.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 19.619.500,- atau 35,88% dengan realisasi fisik sebesar 36,85%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tebo barat Unit IX bertujuan agar penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX terpenuhi sehingga penyelenggaraan fasilitasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

#### **13. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tebo Timur)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 64.684.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 18.156.725,- atau 33,20% dengan realisasi fisik sebesar 33,20%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tebo Timur Unit X bertujuan agar urusan perkantoran baik yang dilaksanakan seksi-seksi maupun di Tata Usaha dapat dilaksanakan secara efektif, dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran.

#### **14. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Batanghari)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 91.054.400,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 42.235.000,- atau 46,38% dengan realisasi fisik sebesar 46,39%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII bertujuan agar pelayanan administrasi perkantoran yang berkaitan dengan penunjang operasional agar terwujud tertib administrasi perkantoran dalam pelaksanaan rutin kantor sehari-hari.

**15. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Muaro Jambi)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 54.500.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp.24.132.000,- atau 44,28% dengan realisasi fisik sebesar 53,52%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII bertujuan agar dapat memenuhi pelayanan administrasi perkantoran dengan terpenuhinya berbagai unsur kebutuhan administrasi perkantoran.

**16. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tanjung Jabung Timur)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 54.684.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp.17.215.000,- atau 31,48% dengan realisasi fisik sebesar 31,48%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XIV bertujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.

**17. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tanjung Jabung Barat)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 109.239.200,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 61.775.800,- atau 56,55% dengan realisasi fisik sebesar 56,55%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,V dan XVI,I bertujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran.

**18. Administrasi Umum Perangkat Daerah. (Tahura)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 72.684.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 26.704.419,- atau 36,74% dengan realisasi fisik sebesar 57,66%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD TAHURA bertujuan agar dapat memenuhi semua kebutuhan ATK, penggandaan, dan keperluan kantor lainnya serta pemenuhan fasilitasi kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam setahun dengan target kinerja 100 %.

**19. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 691.804.250,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 277.005.784,- atau 40,04% dengan realisasi

fisik sebesar 47,87%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bertujuan agar terlaksananya program dan kegiatan tersebut kinerja aparatur instansi / OPD meningkat dan menjadi makin baik, berkualitas dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai bahan dari struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

**20. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bungo)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 198.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp.96.670.727,- atau 48,82% dengan realisasi fisik sebesar 48,82%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Bungo Unit II dan III dengan tujuan agar penyediaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

**21. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Merangin)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 75.720.000,- atau 42,07% dengan realisasi fisik sebesar 42,07%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI dengan tujuan agar penyediaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar dan diharapkan dapat memenuhi pelayanan administrasi perkantoran.

**22. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. (Hilir Sarolangun)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp.24.138.055,- atau 44,14% dengan realisasi fisik sebesar 54,81%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun bertujuan agar penyediaan kebutuhan administrasi di

perkantoran UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun terpenuhi sehingga administrasi perkantoran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

**23. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
(Tanjung Jabung Barat)**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 69.522.800,- atau 38,62% dengan realisasi fisik sebesar 48,49%. Merupakan kegiatan Rutin UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII bertujuan agar terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran yaitu pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit dibidang ke tata usahaan meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, perlengkapan serta peralatan kantor.

**24. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Jumlah anggaran sebesar Rp. 952.217.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 357.894.510,- atau 37,59% dengan realisasi fisik sebesar 46,49%. Merupakan kegiatan Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bertujuan guna pemenuhan pemeliharaan peralatan kantor dalam setahun sesuai dengan target kinerja 100%, sehingga pencapaian program memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah.

**II. Program Pengelolaan Hutan.**

**Program Pengelolaan Hutan memiliki 17 (Tujuh belas) kegiatan bertujuan agar mengoptimalisasi pengelolaan hutan di kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 7.573.692.880,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2022.**

**Realisasi Rp. 459.930.195,- atau sebesar 0,09 % sedangkan realisasi fisik 18,00 %.**

1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

Jumlah anggaran Rp. 260.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.12.074.962,- Realisasi Fisik sebesar 4,64%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud Pembangunan KPHP/KPHL berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan hutan lestari.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Pembinaan ke 2 UPTD KPHP.

1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kewenangan Provinsi (Bungo)

Jumlah anggaran Rp. 139.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 138.125.250,-, Realisasi Fisik sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya rencana tata hutan yang optimal.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pembinaan ke daerah

2. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kewenangan Provinsi (Batanghari)

Jumlah anggaran Rp. 107.715.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 24.470.000,-, Realisasi Fisik sebesar 22,72%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya rencana tata hutan yang optimal.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- c. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- d. Pembinaan ke daerah

3. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Jumlah anggaran Rp. 1.463.186.600,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 58.556.275,- realisasi fisik sebesar 5,65%. Kegiatan ini

dilaksanakan dengan maksud penyediaan data informasi ,koordinasi dan penilaian pengelolaan kawasan hutan.

Realisasi sampai Semester I yaitu :

- a. Pemantauan dan pembinaan sebanyak 2 kali
  - b. Monitoring dan fasilitasi PNPB dan PAD sektor kehutanan
4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di hutan lindung dan hutan produksi (UPTD KPHP Kerinci).

Jumlah anggaran Rp. 205.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 48.153.378,- realisasi fisik sebesar 24,43%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi sampai Semester I yaitu :

- a. Pembinaan dan Monev IUPHHK 2 kali
5. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung (UPTD KPHP Bungo).

Jumlah anggaran Rp. 75.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 32.324.000,- realisasi fisik sebesar 43,10%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya pengendalian kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan.

Realisasi sampai Semester I yaitu :

- a. Pembayaran honorarium
6. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung (UPTD KPHP Merangin).

Jumlah anggaran Rp. 1.551.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 42.607.000,- realisasi fisik sebesar 3,12%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terpantaunya pemanfaatan hutan yang di monitoring.

Realisasi sampai semester I yaitu :

- a. Koordinasi, konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
7. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung ( Hilir Sarolangun).

Jumlah anggaran Rp. 562.100.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 7.256.000,- realisasi fisik sebesar 1,29%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya pengendalian kerja sama pemanfaatan dikawasan hutan.

Realisasi sampai semester I yaitu :

a. Pembayaran honorarium

8. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung ( Tebo Barat).

Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 19.412.660,- realisasi fisik sebesar 19,41%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK.

Realisasi sampai semester I yaitu :

a. Fasilitasi kerja sama dan kemitraan kehutanan sebanyak 1 (satu) kemitraan

b. Monitoring pemegang izin sebanyak 1 kali

9. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung ( Tanjab Timur).

Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp.39.215.902,- realisasi fisik 39,22%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terpantaunya pemanfaatan dikawasan hutan.

Realisasi sampai semester I yaitu :

a. Monitoring Pemanfaatan dan Pengembangan hasil hutan sebanyak 2 kali

b. Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

10. Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung ( Tanjab Barat).

Jumlah anggaran Rp. 2.250.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 3.199.500,- realisasi fisik sebesar 0,31%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud terselenggaranya pemanfaatan dikawasan hutan.

Realisasi sampai semester I yaitu :

- a. Pembayaran honorarium

19 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara. (Dinas)

Jumlah anggaran Rp. 225.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp.0, realisasi fisik 0%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memfasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi.

20. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Bungo)

Jumlah anggaran Rp. 490.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp.206.533.400,- realisasi fisik 46,18%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi ke daerah

21. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Hilir Sarolangun)

Jumlah anggaran Rp. 70.200.000,- yang terealisasi keuangan Rp.3.228.000,- realisasi fisik 4,60%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan konsolidasi ke daerah

22. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Tanjung Jabung Barat)

Jumlah anggaran Rp. 20.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp.0,- realisasi fisik 0%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

23. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Jumlah anggaran Rp. 2.906.850.000,- yang terealisasi keuangan Rp.504.481.478, realisasi fisik 28,98%. Kegiatan ini dilaksanakan

dengan maksud agar penyelenggaraan peningkatan frekuensi perlindungan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.
- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan.
- c. Melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan
- d. Melaksanakan cek KTP
- e. Melaksanakan Penjagaan/ Pengamanan Gudang Barang Bukti

24. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Kerinci)

Jumlah anggaran Rp. 205.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp.48.153.378,- realisasi fisik 24,43%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.
- b. Pelaksanaan patrol pemantauan kebakaran hutan .

25. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Bungo)

Jumlah anggaran Rp. 672.943.400,- yang terealisasi keuangan Rp.89.273.150, realisasi fisik sebanyak 24,31%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.
- b. Pelaksanaan patrol pemantauan kebakaran hutan .
- c. Pembayaran honorarium

26. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Merangin)

Jumlah anggaran Rp. 405.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp.36.133.251,- realisasi fisik 8,92%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya rehabilitasi kawasan hutan yang di kelola.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan.
- b. Pelaksanaan patroli pemantauan kebakaran hutan .

27. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Hulu Sarolangun)

Jumlah anggaran Rp. 205.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp.27.588.000, realisasi fisik 39,60%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar pemenuhan perlindungan penegahan kerusakan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 6 kali.
- b. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Hulu Sarolangun)

28. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Hilir Sarolangun)

Jumlah anggaran Rp. 740.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp.51.144,500, realisasi fisik 8,74%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 14 kali.

29. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Tebo Barat)

Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp.14.636.000, realisasi fisik 21,59%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan dan kebakaran sebanyak 7 kali.

30. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Batanghari)

Jumlah anggaran Rp. 205.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp.57.326.600, realisasi fisik 73,98%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan kawasan sebanyak 5 kali
- b. Pembayaran honorarium

31. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Muaro Jambi)

Jumlah anggaran Rp. 145.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp.31.674.000, realisasi fisik 27,16%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan kawasan sebanyak 5 kali
- b. Pembayaran honorarium

32. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Tanjung Timur)

Jumlah anggaran Rp. 205.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp.22.799.750, realisasi fisik 29,75%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan patroli pengamanan kawasan sebanyak 5 kali

b. Pembayaran honorarium

33. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Tanjab Barat)

Jumlah anggaran Rp. 842.185.000,- yang terealisasi keuangan Rp.112.954.690, realisasi fisik 21,01%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terselenggaranya perlindungan di kawasan hutan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

a. Pelaksanaan patroli pengamanan kawasan sebanyak 11 kali

b. Pembayaran honorarium

34. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu (Dinas)

Jumlah anggaran Rp. 53.191.000,- yang terealisasi keuangan Rp.9.606.000, realisasi fisik 18,06%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terlaksananya pengawasan dan monitoring perizinan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

a. Pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat

b. Pembayaran honorarium

35. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu (Kerinci)

Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp.29.856.697,- realisasi fisik 29,86%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar terlaksananya pemanfaatan pengolahan HHBK.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

a. Pembinaan terhadap KTH penerima bantuan alat ekonomi produktif.

36. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu (Hulu Sarolangun)

Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp.29.419.000, realisasi fisik 66,15%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

37. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun. (Tebo Timur)

Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 35.310.000, realisasi fisik 52,53%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar monitoring dan evaluasi rekonsiliasi pada pemegang izin.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
- b. Pembayaran honorarium

38. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun (Batanghari)

Jumlah anggaran Rp. 42.285.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 10.140.000,- realisasi fisik 23,98%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar sistem penerbitan pelayanan perizinan.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring, pemantauan kegiatan IUPHHK.

39. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun (Muaro Jambi)

Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan Rp. 33.936.068,- realisasi fisik 46,44%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud agar sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan hasil hutan kayu.

Realisasi kegiatan ini sampai semester I yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan monitoring izin yang ada di wilayah kelola UPTD.

**2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

**Program ini total dana sebesar Rp. 114.554.400,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2022. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mengoptimalkan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi. Realisasi keuangan**

**atas kegiatan ini adalah sebesar Rp. 56.887.350,- atau sebesar 49,66 % sedangkan fisik 55,10%.**

1. Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.

Jumlah anggaran Rp. 114.554.400,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 56.887.350,- realisasi fisik sebesar 55,10%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Pemeliharaan Kawasan
- b. Koleksi Tumbuhan

**3. Program Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan.**

**Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan pendukung dengan total dana sebesar Rp.1.676.169.600,- melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun 2022. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp.555.217.200,- atau sebesar 33,12 % sedangkan fisik 44,28%.**

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan.

Jumlah anggaran Rp. 250.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 146.920.000,- realisasi fisik sebesar 58,77%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan.

2. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Kerinci)

Jumlah anggaran Rp. 196.623,280,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 5.265.000,- realisasi fisik 4,30% Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelas KUPS yang di bina.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS
- b. Sosialisasi dan pelatihan pada KUPS

3. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Bungo).

Jumlah anggaran Rp. 1.478.448.600,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 186.568.831,- realisasi fisik 14,01%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelas KUPS yang di bina.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS
- b. Sosialisasi dan pelatihan pada KUPS
- c. Pembayaran Honorarium

4. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Merangin).

Jumlah anggaran Rp. 1.125.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 74.705.702,- realisasi fisik 7,86%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelas KUPS yang di bina.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS
- b. Sosialisasi dan pelatihan pada KUPS
- c. Pembayaran Honorarium

5. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Hulu Sarolangun).

Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 8.160.000,- realisasi fisik sebesar 37,79%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelas KUPS Blue menjadi KUPS Silver.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS
- b. Sosialisasi dan pelatihan pada KUPS

c. Pembayaran Honorarium

6. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Hilir Sarolangun).

Jumlah anggaran Rp. 452.735.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 83.375.420,- realisasi fisik 25,10%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

7. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Tebo Barat).

Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 0,-, realisasi fisik 0%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelembagaan dan kemampuan Kelompok Tani Hutan di Lingkup UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX.

8. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Tebo Timur).

Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.885.000,- realisasi 1,89%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk peningkatan kelembagaan dan kemampuan Kelompok Tani Hutan di Lingkup UPTD KPHP Tebo Timur Unit X.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

9. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Batang Hari).

Jumlah anggaran Rp. 100.000.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 15.723.400,- realisasi fisik 20,26%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk pendampingan kelembagaan KTH dan bina usaha kelola perhutanan sosial.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

10. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (Muaro Jambi).

Jumlah anggaran Rp. 229.687.200,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 33.818.000,- realisasi fisik 14,72%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk pembinaan kepada KUPS terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan dan sosialisasi pemantapan kelola usaha.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS

11. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ( Tanjung Jabung Timur).

Jumlah anggaran Rp. 515.802.000,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 204.665.500,- realisasi fisik 85,11%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk pembinaan kepada KUPS terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan dan sosialisasi pemantapan kelola usaha.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS
- b. Pembayaran Honorarium

12. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan ( Tanjung Jabung Barat).

Jumlah anggaran Rp. 132.500.000,- yang terealisasi fisik 2,28%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk pembinaan kepada KUPS terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan dan sosialisasi pemantapan kelola usaha.

Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :

- a. Jumlah KUPS yang dibina sebanyak 1 KUPS
- b. Pembayaran Honorarium

#### **4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

**Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terdiri dari 1 kegiatan .Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp. 79.884.800,- melalui dana APBD Provinsi Jambi, Realisai Rp. 44.158.875 atau sebesar 55,28%, sedangkan realisasi fisik 58,42%.**

- a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.  
Jumlah anggaran Rp. 79.884.800,- yang terealisasi keuangan sebesar Rp. 44.158.875,-, yang terealisasi fisik 58,42%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud pengendalian pengelolaan DAS.  
Realisasi kegiatan ini sampai Semester I yaitu :
  - a. Pelaksanaan Rapat-Rapat koordinasi
  - b. Pelaksanaan konsolidasi ke daerah
  - c. Pembentukan kelembagaan persiapan Rehabiltasi DAS.

## **II. Analisis Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi**

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 37 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan-Satuan Organisasi pada Dinas-Dinas Provinsi jambi, maka ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan susunan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
- b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi ;
  - Tata kesatuan pengelolaan hutan
  - Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan
  - Pemanfatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan)
  - Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara

- Pelaksanaan pengelolaan aset pemerintahan provinsi Jambi
  - Pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi (kurang dari)  $\leq 6000 \text{ M3 /tahun}$  dan
  - Pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.
- c. Melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di provinsi, yaitu meliputi ,
- Perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas kabupaten/kota.
  - Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konferensi internasional dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- d. Melaksanakan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
- e. Melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) lintas kabupaten/kota dan dalam kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- f. Melaksanakan koordinasi kehutanan dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan
- g. Melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Tabel

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Provinsi Jambi

Nama Perangkat Daerah:  
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Kode				Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
				URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KEHUTANAN										
				PROGRAM PENGELOLA AN HUTAN	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	0,20%	28.117.003.660	PROGRAM PENGELOLA AN HUTAN	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0,20%	28.117.003.660	
					Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	1,58%	-		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	1,58%	-	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	0,83%	-		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penurunan Laju Deforestasi	0,83%	-	
					Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan	UPTD KPHP Kerinci Unit I	65%	530.000.000		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata	65%	530.000.000	

					Rencana Tata Hutan di KPH					Hutan di KPH			
					Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	64,66%	620.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	64,66%	620.000.000
					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	30%	520.000.000		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	30%	520.000.000
					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	30%	530.000.000		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	30%	530.000.000
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk operasional kantor (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	530.000.000		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk operasional kantor (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	30%	530.000.000
					Persentase Penyediaan Sarana	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	30%	530.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana	30%	530.000.000

					Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)					Operasional KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)				
					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	30%	530.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	30%	530.000.000	
					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	30%	491.520.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	30%	491.520.000	
					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	30%	530.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	30%	530.000.000	
					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	Dinas Kehutanan	30%	530.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	30%	530.000.000	

					Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	30%	520.000.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH (UPTD Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	30%	520.000.000	
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (Dinas)	Dinas Kehutanan	70%	700.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (Dinas)	70%	700.000.000	
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	Dinas Kehutanan	70%	50.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	70%	50.000.000	
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Dinas Kehutanan	70%	100.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	70%	100.000.000	
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Dinas Kehutanan	-	100.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	-	100.000.000	

					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Dinas Kehutanan	-	50.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	-	50.000.000	
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	50.000.000		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	-	50.000.000	
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Dinas Kehutanan	70%	50.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	70%	50.000.000	
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	70%	50.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	70%	50.000.000	

					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	Dinas Kehutanan	70%	50.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	70%	50.000.000	
					Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Dinas Kehutanan	40%	150.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH (UPTD KPHP tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	40%	150.000.000	
					Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan (Dinas)	Dinas Kehutanan	50%	2.413.449.240		Dinas Kehutanan	Persentase peningkatan pemanfaatan di kawasan hutan (Dinas)	50%	2.413.449.240	
					Jumlah Lokasi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola KPH dan masyarakat	UPTD KPHP Kerinci Unit I	7 Lokasi	147.000.000		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah Lokasi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola KPH dan masyarakat	7 Lokasi	147.000.000	
					Persentase Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	147.000.000		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	-	147.000.000	

					Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan (UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	35%	2.266.000.000		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan (UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	35%	2.266.000.000	
					Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	40%	187.000.000		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	40%	187.000.000	
					Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	50%	805.340.000		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan (UPTD KPHP Unit VIII Hulu Sarolangun)	50%	805.340.000	
					Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	11%	176.000.000		UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan KPH (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	11%	176.000.000	
					Persentase Pemanfataaan di kawasan Hutan Produksi (UPTD	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	49%	144.739.450		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase Pemanfataaan di kawasan Hutan Produksi (UPTD	49%	144.739.450	

					KPHP Tebo Timur Unit X)					KPHP Tebo Timur Unit X)			
					Persentase penyelenggaraan pemanfaatan kawasan hutan produksi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	50%	142.033.000		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	Persentase penyelenggaraan pemanfaatan kawasan hutan produksi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	50%	142.033.000
					Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	75.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	-	75.000.000
					Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	47%	185.000.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	47%	185.000.000
					Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	45%	1.630.000.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	45%	1.630.000.000

					XVII)								
					Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi diluar kawasan hutan (Dinas)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi		997.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi diluar kawasan hutan (Dinas)	24%	997.000.000
					Luas tutupan lahan yang bertambah	UPTD KPHP Kerinci Unit I	60 Ha	478.000.000		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Luas tutupan lahan yang bertambah	60 Ha	478.000.000
					Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	30 Ha	728.000.000		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	30 Ha	728.000.000
					Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi (UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4,58 %	570.500.000		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi (UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI)	4,58 %	570.500.000
					Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1,70 %	188.000.000		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	1,70 %	188.000.000
					Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan (UPTD KPHP Unit VII	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	240.200.000		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan (UPTD KPHP Unit VII	30%	240.200.000

					Hilir Sarolangun)						Hilir Sarolangun)			
					Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	30%	641.500.000			UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/kebun bibit Tanaman Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	30%	641.500.000
					Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	55%	643.350.000			UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	55%	643.350.000
					Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	55%	600.500.000			UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XI	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	55%	600.500.000
					Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	80%	778.000.000			UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	80%	778.000.000

					Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutan/kebun bibit Tanaman Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Barat Unit XV, XVI dan XVII	60%	448.000.000		UPTD KPHP Tanjung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutan/kebun bibit Tanaman Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	60%	448.000.000	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (Dinas)	Dinas Kehutanan	0,83%	4.958.223.000		Dinas Kehutanan	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (Dinas)	0,83%	4.958.223.000	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	UPTD KPHP Kerinci Unit I	0,83%	928.654.250		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	0,83%	928.654.250	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	0,83%	831.897.650		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	0,83%	831.897.650	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	0,83%	981.444.250		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	0,83%	981.444.250	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	0,83%	957.064.250		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	0,83%	957.064.250	

					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	0,83%	838.322.500		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	0,83%	838.322.500	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	0,83%	588.717.000		UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	0,83%	588.717.000	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	0,83%	482.400.000		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	0,83%	482.400.000	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	0,83%	602.400.000		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	0,83%	602.400.000	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	0,83%	680.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	0,83%	680.000.000	
					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	0,83%	997.112.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	0,83%	997.112.000	

					Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	0,83%	1.241.297.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase Penurunan Laju Deforestasi (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	0,83%	1.241.297.000	
					Persentase Pengawasan Perizinan Berusaha HHBK dan pelaksanaan identifikasi potensi HHBK (Dinas)	Dinas Kehutanan	20%	63.099.100		Dinas Kehutanan	Persentase Pengawasan Perizinan Berusaha HHBK dan pelaksanaan identifikasi potensi HHBK (Dinas)	20%	63.099.100	
					Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran HHBK	UPTD KPHP Kerinci Unit I	6 KTH	137.500.000		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran HHBK	6 KTH	137.500.000	
					Jumlah Usaha Produktif HHBK yang dilakukan KTH (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	3 KTH	105.000.000		UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Jumlah Usaha Produktif HHBK yang dilakukan KTH (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	3 KTH	105.000.000	
					Jumlah kelompok yang dibina dalam pelatihan pengolahan HHBK (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	-	-		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Jumlah kelompok yang dibina dalam pelatihan pengolahan HHBK (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	-	-	

					Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun (Dinas)	Dinas Kehutanan Prov. Jambi	45%	250.000.000		Dinas Kehutanan Prov. Jambi	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun (Dinas)	45%	250.000.000	
					Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	64%	218.294.340		UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	64%	218.294.340	
					Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Primer Hasil Hutan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	50%	45.000.000		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Primer Hasil Hutan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	50%	45.000.000	
					Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu yang legal (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	47%	61.455.000		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu yang legal (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	47%	61.455.000	

					XI dan XII)								
					Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	60%	100.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	60%	100.000.000
					Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	Dinas Kehutanan	35%	299.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	35%	299.000.000
					Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi (UPTD Tahura)	UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	55%	1.985.000.000		UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi (UPTD Tahura)	55%	1.985.000.000
					Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kewenangan daerah	Dinas Kehutanan	55%	300.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa untuk kewenangan daerah	55%	300.000.000
					Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem	Dinas Kehutanan	55%	900.000.000		Dinas Kehutanan	Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	55%	900.000.000

					penting									
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (Dinas)	Dinas Kehutanan	41,62 %	1.229.600.000		Dinas Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (Dinas)	41,62 %	1.229.600.000	
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	UPTD KPHP Kerinci Unit I	41,46 %	568.747.355		UPTD KPHP Kerinci Unit I	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	41,46 %	568.747.355	
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	25,26 %	1.470.307.465		UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	25,26 %	1.470.307.465	
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	31,45 %	1.542.963.865		UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Merangin Unit IV,	31,45 %	1.542.963.865	

					Unit IV, V dan VI)						V dan VI)			
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	34,75 %	400.000.000			UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	34,75 %	400.000.000
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	32,65 %	1.312.134.400			UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	32,65 %	1.312.134.400
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	27,85 %	680.000.000			UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	27,85 %	680.000.000

					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	27,85 %	310.885.255		UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	27,85 %	310.885.255	
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	27,85 %	322.000.000		UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	27,85 %	322.000.000	
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	27,85 %	450.000.000		UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	27,85 %	450.000.000	
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	27,85 %	653.285.000		UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	27,85 %	653.285.000	

					Timur Unit XIV)						XIV)			
					Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	27,85 %	871.983.000		UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	Persentase Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	27,85 %	871.983.000	
					Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis (Dinas)	Dinas Kehutanan	8 UPTD dan 12 Kelompok	260.000.000		Dinas Kehutanan	Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS pendataan lahan kritis (Dinas)	8 UPTD dan 12 Kelompok	260.000.000	

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2022**

<b>Sebelum</b>					<b>Sesudah</b>				
Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Anggaran (Rp) Tahun 2022	Kode	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2022	Anggaran (Rp) Tahun 2022
		Outcome/ Output					Outcome/ Output		
<b>3.28</b>	<b>Urusan Bidang Kehutanan</b>			<b>16.122.794.304</b>	<b>3.28</b>	<b>Urusan Bidang Kehutanan</b>			<b>16.926.530.104</b>
<b>3.28.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>3.28.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
<b>3.28.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>3.28.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			196.226.900	3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			238.612.900
3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			24.792.000	3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			21.732.000
3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			168.208.000	3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			182.233.000

3.28.01.1.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				3.28.01.1.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
3.28.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal				3.28.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal			40.000.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			120.991.100	3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			270.941.100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			255.608.000	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			357.615.000
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Kerinci)				3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Kerinci)			
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.000.000	3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan			5.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000	3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48.184.800	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48.184.800

3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Merangin)				3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Merangin)			
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48.184.800	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48.184.800
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Tebo Barat)				3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Tebo Barat)			
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48.184.800	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48.184.800
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Muaro Jambi)				3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Muaro Jambi)			
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.000.000	3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.000.000
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.500.000	3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.500.000
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48.000.000	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48.000.000

3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Tanjabbar)				3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Tanjabbar)			
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		102.739.200	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		102.739.200
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD TAHURA)				3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD KPHP Tanjabbar)			
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			66.184.800	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			66.184.800
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
3.28.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			871.000.000	3.28.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			871.000.000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			572.445.760	3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			665.265.760

3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Merangin)				3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Merangin)			
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			199.000.000	3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			199.000.000
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Hilir Sarolangun)				3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD KPHP Hilir Sarolangun)			
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.000.000	3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.000.000
<b>3.28.03</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>				<b>3.28.03</b>	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>			
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)				3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			

3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			260.000.000	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			283.760.000
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			
3.28.03.1.03.08	Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	30 Kali	1.339.966.600	3.28.03.1.03.08	Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	60 Kali	1.522.126.600
		Jumlah Penyusunan Rantek Penanaman Endemik di KEE Pantai Cemara	1 Dokumen				Jumlah Penyusunan Rantek Penanaman Endemik di KEE Pantai Cemara	1 Dokumen	
		Jumlah Persiapan Desain Teknis	1 Dokumen				Jumlah Persiapan Desain Teknis	1 Dokumen	
		Jumlah Rantek Rehabilitasi Gambut	25 Ha				Jumlah Rantek Rehabilitasi Gambut	15 Ha	
		Jumlah Reboisasi Agroforestry	135 Ha				Jumlah Reboisasi Agroforestry	135 Ha	
		Jumlah Rehabilitasi Gambut	15 Ha				Jumlah Rehabilitasi Gambut	15 Ha	

3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung				3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			
	Penyediaan Data dan Informasi wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Pemetaan Potensi dan Distribusi Agroforestri Aren dan Kopi	4 Laporan	40.000.000		Penyediaan Data dan Informasi wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Pemetaan Potensi dan Distribusi Agroforestri Aren dan Kopi	4 Laporan	56.920.000
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Hilir Sarolangun)				3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Hilir Sarolangun)			
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Penyusunan Rancangan Teknis RHL		16.480.000	3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Penyusunan Rancangan Teknis RHL		16.480.000
		Luas Penanaman		503.560.000			Luas Penanaman		503.560.000
		Luas Pemeliharaan tahun I		42.060.000			Luas Pemeliharaan tahun I		42.060.000
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Tanjabbar)				3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Tanjabbar)			

3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH			2.223.000.000	3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH			2.245.920.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara				3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara			
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Rehabilitasi Lahan	11 UPTD KPHP	225.000.000	3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Rehabilitasi Lahan	5 UPTD	75.000.000
		Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Di Kawasan Hutan	7 UPTD KPHP						
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Merangin)				3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Merangin)			
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pengadaan Bibit Kayu Untuk Naungan	800 Batang	250.000.000	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pengadaan Bibit Kayu Untuk Naungan	800 Batang	250.000.000
		Jumlah Pengembangan Pembibitan Tanaman Hutan	25000 Batang	40.000.000			Jumlah Pengembangan Pembibitan Tanaman Hutan	25000 Batang	40.000.000

3.28.03.1.04.06	Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan			45.000.000	3.28.03.1.04.06	Pembinaan dan/atau Pengawasan Dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan			45.000.000
	Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Hilir Sarolangun)				3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Hilir Sarolangun)			
3.28.03.1.04.06	Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan	Jumlah Unit Kebun Bibit Tanaman Hutan (1 unit)		50.000.000	3.28.03.1.04.06	Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan	Jumlah Unit Kebun Bibit Tanaman Hutan (1 unit)		50.000.000
3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah Monitoring dan evaluasi RHL		20.200.000	3.28.03.1.04.09	Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah Monitoring dan evaluasi RHL		20.200.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			468.800.000,00	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			510.744.800

3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan Lahan	- Jumlah Perkada tentang Moratorium Gambut yang disusun	1 dokumen	445.000.000	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan Lahan	- Jumlah Perkada tentang Moratorium Gambut yang disusun	1 dokumen	477.160.000
		- Jumlah Lokasi Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Perda tentang Penanggulangan Karhutla	2 Kabupaten	151.875.000			- Jumlah Lokasi Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Perda tentang Penanggulangan Karhutla	2 Kabupaten	151.875.000
		- Jumlah Paket Peralatan Pemadaman Karhutla	5 Paket	500.000.000			- Jumlah Paket Peralatan Pemadaman Karhutla	5 Paket	500.000.000
		- Jumlah Pelatihan MPA	3 kali	198.000.000			- Jumlah Pelatihan MPA	3 kali	198.000.000
		- Jumlah Pembangunan Pos Jaga	1 unit	200.000.000			- Jumlah Pembangunan Pos Jaga	1 unit	200.000.000
		- Jumlah Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (waduk/embung portable)	50 Unit	500.000.000			- Jumlah Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran (waduk/embung portable)	50 Unit	500.000.000

		- Jumlah Penjagaan Area Hotspot Berbasis Posko	35 kali	262.500.000			- Jumlah Penjagaan Area Hotspot Berbasis Posko	35 kali	262.500.0 00
3.28.03.1. 05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Kerinci)				3.28.03.1. 05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Kerinci)			
3.28.03.1. 05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Pena nggulangan kebakaran hutan dan Lahan			205.000.000	3.28.03.1. 05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Pena nggulangan kebakaran hutan dan Lahan			205.000.0 00
3.28.03.1. 05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Bungo)				3.28.03.1. 05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Bungo)			
3.28.03.1. 05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Pena nggulangan kebakaran hutan dan Lahan			391.153.400	3.28.03.1. 05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Pena nggulangan kebakaran hutan dan Lahan			414.673.4 00

3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Merangin)				3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Merangin)			
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Patroli Bersama	3 Kali	50.000.000	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Patroli Bersama	3 Kali	50.000.000
		Frekwensi Pengawasan Berkala Pemegang Izin Atas Pelaksanaan Perlindungan Kawasan HCV dan HCS	32 Kali	50.000.000			Frekwensi Pengawasan Berkala Pemegang Izin Atas Pelaksanaan Perlindungan Kawasan HCV dan HCS	32 Kali	50.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Hulu Sarolangun)				3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Hulu Sarolangun)			

3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan Lahan			205.000.000	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan Lahan			205.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Hilir Sarolangun)				3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Hilir Sarolangun)			
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Patroli rutin dan Patroli komunitas		118.800.000	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Patroli rutin dan Patroli komunitas		142.560.000
		Jumlah Operasi gabungan		165.200.000			Jumlah Operasi gabungan		165.200.000
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Pelatihan kelompok MPA		66.000.000	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Pelatihan kelompok MPA		66.000.000
		Jumlah Pembangunan pos penjagaan		120.000.000			Jumlah Pembangunan pos penjagaan		126.840.000

3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Barat)				3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Barat)			
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan Lahan			100.000.000	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan Lahan			100.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Timur)				3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Timur)			
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan Lahan			80.000.000	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan Lahan			80.000.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjabbar)				3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjabbar)			

3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan Lahan	Jumlah training Masyarakat Peduli Api (MPA)	4 Kali	88.000.000	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan Lahan	Jumlah training Masyarakat Peduli Api (MPA)	4 Kali	88.000.000
		Pendirian Infrastruktur/fasilitas pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Paket	375.760.000			Pendirian Infrastruktur/fasilitas pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Paket	375.760.000
		Jumlah hari Pengendalian/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	35 Kali	148.710.000			Jumlah hari Pengendalian/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	35 Kali	168.030.000
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)				3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)			
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan Lahan			145.000.000	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan Lahan			145.000.000

3.28.3.28.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHP Kerinci)				3.28.3.28.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHP Kerinci)			
3.28.3.28.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran HHBK	6 KTH	100.000.000	3.28.3.28.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati			100.000.000
		Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan pemasaran HHBK	6 KTH						
3.28.3.28.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3/Tahun (UPTD KPHP Muaro Jambi)				3.28.3.28.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6.000 M3/Tahun			
3.28.3.28.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian Industri Kapasitas <6000 M3/Tahun	15 Industri	100.000.000	3.28.3.28.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian Industri Kapasitas <6000 M3/Tahun	15 Industri	118.263.000

		Jumlah pengawasan monitoring peredaran hasil hutan	7 Industri				Jumlah pengawasan monitoring peredaran hasil hutan	7 Industri	
		Sosialisasi peraturan kehutanan	2 kali				Sosialisasi peraturan kehutanan	1 Kali	
							Perjalanan dinas Pembahasan RPHJP	1 Kali	
							Study Banding Peningkatan Pengetahuan tentang Pengelolaan HHBK	1 Kali	
3.28.04	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>				3.28.04	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>			
3.28.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi				3.28.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi			

3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan Tahura Provinsi		25 Ha	292.652.231	3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan Tahura Provinsi		25 Ha	292.652.231
3.28.05	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>				3.28.05	<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM di Bidang Kehutanan	Jumlah Sekolah Lapang Agroforestry Melibatkan Petani, Pendamping, PPL	5 Kali	250.000.000	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM di Bidang Kehutanan	Jumlah Sekolah Lapang Agroforestry Melibatkan Petani, Pendamping, PPL	5 Kali	270.280.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Fasilitas Pertemuan Desa / Kelompok	12 Paket	158.400.000	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Fasilitas Pertemuan Desa / Kelompok	12 Paket	178.680.000

		Jumlah Penyediaan Sarana Ekonomi Produktif	1 Paket				Jumlah Penyediaan Sarana Ekonomi Produktif	1 Paket	
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah fasilitasi akses permodalan ke sumber-sumber keuangan lainnya 1 kali		76.369.600	3.28.05.1.01.03	Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah fasilitasi akses permodalan ke sumber-sumber keuangan lainnya 1 kali		76.369.600
		Jumlah fasilitasi pembangunan BUMDES kelompok perhutanan sosial dan pelaku usaha lainnya 2 kali		80.000.000			Jumlah fasilitasi pembangunan BUMDES kelompok perhutanan sosial dan pelaku usaha lainnya 2 kali		80.000.000
		Jumlah fasilitasi pengembangan bisnis 2 kali		100.000.000			Jumlah fasilitasi pengembangan bisnis 2 kali		100.000.000
		Jumlah faslitasi penguatan manajemen kelompok 13 kelompok		39.000.000			Jumlah faslitasi penguatan manajemen kelompok 13 kelompok		39.000.000
		Jumlah FGD belajar bersama pemegang izin perhutanan sosial 2 kali		150.000.000			Jumlah FGD belajar bersama pemegang izin perhutanan sosial 2 kali		150.000.000

		Jumlah FGD penyiapan rencana bisnis 2 kali		140.000.000		Jumlah FGD penyiapan rencana bisnis 2 kali		140.000.000
		Jumlah pelaksanaan mediasi konflik 25 kali		682.400.000		Jumlah pelaksanaan mediasi konflik 22 kali		714.560.000
						Jumlah penyelesaian administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi (PPTK dan staf PPTK) 1 Tahun		
						Jumlah fasilitasi dan pendampingan pengelolaan Hutan Adat 3 kali		
						Jumlah monev konflik pada Kawasan Ekosistem Esensial dan Daerah Penyangga KSA dan KPA 3 kali		

3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Kerinci)				3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Kerinci)			
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			196.623.280	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			196.623.280
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Bungo)				3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Bungo)			
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			107.506.833	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			138.826.833
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Merangin)				3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Merangin)			

3.28.05.1. 01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Mediasi Konflik	6 Kali	150.000.000	3.28.05.1. 01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Mediasi Konflik	6 Kali	150.000.000
		Jumlah Identifikasi Potensi Bisnis Untuk Komoditi terpilih	3 Kali	30.000.000			Jumlah Identifikasi Potensi Bisnis Untuk Komoditi terpilih	3 Kali	30.000.000
		Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pertemuan Untuk Mempersiapkan Rencana Bisnis	2 Kali	20.000.000			Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pertemuan Untuk Mempersiapkan Rencana Bisnis	2 Kali	20.000.000
		Jumlah Pelaksanaan Pertemuan Bisnis Untuk Membangun Kemitraan Pemasaran Dengan Baik Dengan Pihak Lain ( Toko Retail, Toko Online dll) Produk Gula Aren dan Kopi	6 Kali	60.000.000			Jumlah Pelaksanaan Pertemuan Bisnis Untuk Membangun Kemitraan Pemasaran Dengan Baik Dengan Pihak Lain ( Toko Retail, Toko Online dll) Produk Gula Aren dan Kopi	6 Kali	60.000.000

3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Hulu Sarolangun)				3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Hulu Sarolangun)			
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			100.000.000	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			100.000.000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Timur)				3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Timur)			
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			100.000.000	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			100.000.000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Hilir Sarolangun)				3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Hilir Sarolangun)			

3.28.05.1. 01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah fasilitasi penguatan kelembagaan		3.170.000	3.28.05.1. 01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah fasilitasi penguatan kelembagaan		3.170.000
		Jumlah Fasilitasi desa/Pertemuan kelompok		3.170.000			Jumlah Fasilitasi desa/Pertemuan kelompok		3.170.000
		Jumlah Penyusunan Rancangann Teknis Kegiatan Penanaman Agroforestry		66.000.000			Jumlah Penyusunan Rancangann Teknis Kegiatan Penanaman Agroforestry		66.000.000
3.28.05.1. 01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)				3.28.05.1. 01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)			
3.28.05.1. 01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			229.687.200	3.28.05.1. 01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			229.687.200

### **III. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi**

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan. Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum
2. Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial Budaya
3. Pengembangan Ekonomi Rakyat, Investasi dan Kepariwisata
4. Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam Serta Lingkungan Hidup
5. Penataan Tata Pemerintahan yang Baik

Dan juga tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi (RPJMD) Tahun 2016 -2021 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi.
2. Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
3. Meningkatkan tata kelola kehutanan yang bersih, transparan dan akuntabel secara partisipatif
4. Tersedianya ketersediaan data geospasial bidang kehutanan
5. Mewujudkan perlindungan kawasan hutan

6. Mewujudkan tutupan lahan dan kawasan hutan

Berdasarkan capaian prioritas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terkait dengan capaian prioritas ke-4 yaitu : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **IV. Rancangan RKPD**

Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 untuk Dinas Kehutanan tetap mengacu pada prioritas pembangunan kehutanan sebagai berikut :

- a. Pemantapan dan Penyelesaian konflik penggunaan kawasan hutan.
- b. Pembangunan dan Peningkatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
- c. Restrukturisasi dan revitalisasi industri kehutanan
- d. Rehabilitasi hutan dan lahan
- e. Perlindungan hutan

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kehutanan maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2022 merencanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan capaian prioritas daerah adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Hutan dengan kegiatan terdiri dari :
  1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konvensional (KPHK).
  2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
  3. Pelaksanaan Rehabilitasi di luar Kawasan Hutan Negara
  4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
  5. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
  6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6.000m<sup>3</sup>/Tahun.

7. Perbenihan Tanaman Hutan
8. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPTD KPHP Kerinci Unit I
9. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD KPH Kerinci Unit I
10. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Kerinci Unit I.
11. Pelaksanaan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) UPTD KPH Kerinci Unit I.
12. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III.
13. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
14. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
15. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
16. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
17. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
18. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
19. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
20. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
21. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
22. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur

23. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
  24. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di UPTD Tahura
- b. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan terdiri dari :
1. Perencanaan kegiatan pengelolaan KPH, KPHL
  2. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
  3. Pemantapan dan evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK)
  4. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I
  5. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
  6. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
  7. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Hulu Sarolangun Unit VII
  8. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Hilir Sarolangun Unit VIII
  9. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
  10. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
  11. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
  12. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
  13. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
  14. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
  15. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD Tahura
  16. Pengelolaan hutan kenali
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan terdiri dari :
1. Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

2. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan
3. Ground Chek Hotspot (Pengecekan titik panas) dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan
4. Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan
5. Pembentukan/pembinaan Masyarakat Sadar Api (MPA)
6. Pelatihan keteknikan untuk menunjang PLTB
7. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan
8. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan
9. Monitoring dan Evaluasi bekas kebakaran hutan dan lahan
10. Sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan
11. Monitoring sumber daya manusia dan sarana prasarana kebakaran
12. Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan
13. Pengamanan batas kawasan hutan dan kawasan hutan
14. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
15. Pemantapan kawasan hutan
16. Evaluasi izin pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi
17. Fasilitasi penanganan konflik dalam kawasan hutan
18. Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keaneragaman hayati
19. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I
20. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III.
21. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV,V dan VI
22. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Hulu Sarolangun Unit VII
23. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Hilir Sarolangun Unit VIII
24. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX

25. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
26. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
27. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
28. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
29. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII .
30. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD Tahura

d. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan.
4. Monitoring pengelolaan DAS

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **1. Telaahan Terhadap Kebijakan**

Permasalahan pengelolaan sumber daya alam hutan di Indonesia umumnya dan di Provinsi Jambi khususnya, tidaklah terletak pada suatu sisi pandang saja, tetapi justru saling terkait mulai dari sektor hulu yaitu eksploitasi, penataan ruang dan kawasan, sosial ekonomi masyarakat, sampai ke hilir berupa akses pasar produk-produk sektor kehutanan. Keterkaitan antara sektor dan tahapan pengelolaan sumberdaya hutan menjadi suatu dasar bagi kebijakan strategis dan tidak bersifat parsial dalam pemecahan masalah pengelolaan sumber daya hutan.

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan di Propinsi Jambi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. *Aspek terkait Penataan Ruang dan Kawasan* : Adanya konflik kepentingan antara sektor Kehutanan dengan non-kehutanan menjadi muara masalah penataan ruang dan kawasan yang berakibatnya berupa tumpang tindih penggunaan kawasan yang ada.
2. *Aspek pemasaran produk Kehutanan*; Kesenjangan kapasitas industri dengan kemampuan menyediakan bahan baku industri sampai pada permasalahan persaingan harga yang tidak kompetitif antara produksi yang legal dengan bentuk izin lainnya.
3. *Illegal Logging dan kebakaran hutan*; Krisis multi dimensi yang berkepanjangan berdampak pada mata pencaharian masyarakat hingga peningkatan lahan kritis akibat rusaknya kawasan hutan. Keadaan ini semakin diperparah oleh kondisi menjamurnya Industri Primer Hasil Hutan dan izin lainnya serta belum maksimalnya peran para pihak dalam pengendalian kebakaran hutan.
4. *Kualitas Hutan yang semakin menurun*; adanya illegal logging dan kebakaran hutan merupakan faktor kuat bagi penurunan kualitas dan potensi sumberdaya hutan.

5. *Masalah kesejahteraan masyarakat sekitar hutan*; Belum tercapainya pendekatan yang komprehensif serta menyentuh seluruh dimensi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
6. *Sumber Daya Manusia Pengelola Hutan masih terbatas*, secara kuantitas jumlah polisi hutan, juru ukur, teknisi dan penyuluh kehutanan sangat terbatas, dan secara kualitas keterampilan dan kemampuannya harus ditingkatkan.
7. *Perubahan Iklim*, Isu perubahan iklim *saat ini sangat penting dimana Provinsi Jambi adalah termasuk daerah rawan bencana yang di timbulkan oleh alam misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan.*

Langkah strategis yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dalam pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan : melalui pembentukan Tim Terpadu dengan melibatkan multipihak (adat, tomas, polri, TNI, Instansi terkait), sosialisasi / penyebarluasan hasil tata batas kawasan hutan melalui pendampingan/ penyuluhan.
2. Percepatan Pembangunan HTR, HD dan kemitraan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan.
3. Kampanye menanam dan pemberian bibit tanaman kehutanan disetiap even kegiatan kehutanan kepada seluruh lapisan masyarakat guna merehabilitasi kawasan hutan.
4. Patroli Terpadu (pengamanan dan menanam tanaman kehutanan) ; Peningkatan SDM Polhut, Sarpras dan pendanaan pengamanan hutan di daerah serta penyuluhan/ sosialisasi penegakan hukum.
5. Meningkatkan pelayanan usaha kehutanan dan tertib peredaran hasil hutan ; Peningkatan usaha Hutan Tanaman, Hutan Alam dan Hutan Rakyat, fasilitasi pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.

6. Mengantisipasi dampak dari perubahan iklim sedini mungkin dengan cara memberikan kesadaran pada masyarakat untuk menjaga lingkungan.
7. Bekerja sama dengan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang kehutanan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk Rehabilitasi Hutan dan peningkatan ekonomi sekitar hutan

## **2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi**

Rencana Kerja sebagai bagian integral dalam implementasi Rencana Strategik tertuang dalam penjabaran dari Program-program dan kegiatan-kegiatan strategik dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kinerja/ kegiatan tersebut sebagai suatu jabaran program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Lebih jauh dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Pada tahun 2022 terdapat sejumlah kegiatan yang memberi nuansa serta upaya bagi pencapaian visi, misi, dan sasaran organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Implementasi yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2022 mencakup 75 **Sub 17 Kegiatan** dalam 5 **Program** untuk pembangunan kehutanan dan 91 **Sub 2 Kegiatan** dalam 1 **Program** untuk rutin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan UPTD KPHP guna mendukung 4 **Kebijakan Prioritas Pembangunan Kehutanan**. Ikhtisar program dan kegiatan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel Rencana Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi  
Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan kawasan hutan	Sasaran 1 : Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan ekosistemnya	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	0,2%	0,2%	0,2%	0,12%	0,12%
		Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal	15%	20%	26%	38%	44%
s		Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan	Persentase kontribusi sector kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
		Sasaran 4 : Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	8,2%	12%	15,78%	19,54%	23,30%
		Sasaran 5 :	Persentase	1,46%	1,58%	1,71%	1,85%	1,99%

		Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi					
		Sasaran 6 : Peningkatan kelembagaan pengendalian karhutla	Persentase penurunan laju deforestasi	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%

## Kebijakan 1

## “Pengelolaan Hutan”

Program Pengelolaan Hutan kegiatan terdiri dari:

- Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
- Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi di KPHP Unit XI dan XII Batanghari.
- Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi di KPHP Unit XIII Muaro Jambi.
- Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di KPHP Merangin Unit IV,V dan VI.
- Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di KPHP Tebo Barat Unit IX.
- Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) di KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV.
- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Kerinci Unit I.
- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Bungo Unit II dan III
- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Merangin Unit IV,V dan VI.
- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun.
- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun.
- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Tebo Barat Unit IX.
- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Tebo Timur Unit X.
- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Unit XI dan XII Batanghari.
- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Unit XIII Muaro Jambi.
- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur.
- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan

- x. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara di KPHP Unit XI dan XII Batanghari.
- y. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- z. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Kerinci Unit I.
- å. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Bungo Unit II dan III
- ä. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Merangin Unit IV,V dan VI.
- ö. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Limau Unit VII Hulu Sarolangun.
- aa. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Unit VIII Hilir Sarolangun.
- bb. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di KPH Tebo Barat Unit IX.
- cc. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di KPH Tebo Timur Unit X.
- dd. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Unit XI dan XII Batanghari.
- ee. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Unit XIII Muaro Jambi.
- ff. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Unit XIV Tanjung Jabung Timur.
- gg. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Unit XV, XVI, XVII Tanjung Jabung Barat
- hh. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- ii. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di KPH Kerinci Unit I.
- jj. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di KPH Limau Unit VII Hulu Sarolangun.
- kk. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di KPH Unit VIII Hilir Sarolangun.
- ll. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m<sup>3</sup>/Tahun.
- mm. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m<sup>3</sup>/Tahun di KPH Unit VIII Hilir Sarolangun.
- nn. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m<sup>3</sup>/Tahun di KPH Unit Tebo Timur Unit X.
- oo. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m<sup>3</sup>/Tahun di KPH Unit XI dan XII Batanghari.
- pp. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m<sup>3</sup>/Tahun di KPH Unit XIII Muaro Jambi.
- qq. Perbenihan Tanaman Hutan.

## **Kebijakan 2**

### **“Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”**

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kegiatan terdiri dari :

1. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan /atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade Endangered Species).
2. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
3. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)Provinsi

## **Kebijakan 3**

### **“Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan”**

Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan kegiatan terdiri dari :

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan Sumber Daya Manusia bidang Kehutanan.
2. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Kerinci Unit I.
3. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Bungo Unit II dan III
4. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Merangin Unit IV,V dan VI.
5. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
6. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
7. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Tebo Barat Unit IX.
8. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPHP Tebo Timur Unit X.
9. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPH Unit XI dan XII Batanghari.
10. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPH Unit XIII Muaro Jambi.
11. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPH Unit XIV Tanjung Jabung Timur.
12. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di KPH Unit XV,XV,XVI Tanjung Jabung Barat.

- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai kegiatan terdiri dari :
1. Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam satu (1) daerah provinsi.

### **3. Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022**

Pada tahun 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

#### **I. Program Pengelolaan Hutan dengan kegiatan terdiri dari :**

1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
  - Jumlah unit yang di evaluasi 2 UPTD
2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Merangin)
  - Jumlah unit yang di fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan sebanyak 3 unit.
3. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Tebo Barat)
  - Jumlah sosialisasi pengelolaan kawasan kehutanan 1 kali.
  - Jumlah unit yang di fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan sebanyak 1 kali.
4. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Tanjabtlim)
  - Jumlah lokasi kawasan unit manajemen yang dipantau pembagian blok atau petak pengelolaan hutan sebanyak 4 lokasi.
5. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Kerinci Unit I

- Jumlah Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan 6 kelompok.
  - Jumlah monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor kehutanan 1 Tahun.
  - Pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan 5 kasus.
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan 1 tahun
8. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit II dan III Bungo
- Pemantauan dan pembinaan pada areal KPHP yang ada ijin 10 kali
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 1 kasus.
  - Fasilitasi kerjasama dan 1 kemitraan
9. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit IV,V dan VI Merangin
- Pembinaan dan monitoring pada areal KPHP yang ada ijin 1 Tahun.
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan 1 tahun
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
  - Fasilitasi kerjasama dan 2 kemitraan.
10. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit VI Hulu Sarolangun
- Pemanfaatan hasil dan PNBP 1 Tahun.
  - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan 1 Tahun.
  - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 6 kasus.

- Fasilitasi kerjasama dan 1 kemitraan
11. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP  
Unit VIII Hilir Sarolangun
    - Pemanfaatan hasil hutan dan PNBP 1 Tahun
    - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
    - Laporan dan Data Pemegang Izin di dalam Wilayah kerja UPTD KPHP 1 Tahun.
    - Fasilitasi kerjasama dan 1 kemitraan
  12. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP  
Unit IX Tebo Barat
    - Pemanfaatan hasil hutan dan PNBP 1 Tahun.
    - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
    - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan 1 Tahun.
    - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 5 kasus
    - Fasilitasi kerjasama dan 1 kemitraan
  13. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP  
Unit IX Tebo Timur
    - Jumlah pemantauan KPHP yang ada ijin 16 kali.
    - Jumlah monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor kehutanan 1 tahun.
    - Jumlah pengembangan pengujian pengendalian peredaran hasil hutan 5 kasus.
    - Fasilitasi kerja sama dan 1 kemitraan
  14. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP  
Unit XI dan XII Batanghari
    - Pemanfaatan hasil hutan 1 tahun
    - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
    - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan
    - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

- Fasilitasi kerjasama dan 5 kemitraan
15. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
    - Pemanfaatan hasil hutan dan PNBP 1 Tahun
    - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
    - Monitoring dan fasilitasi PNBP dan PAD sektor Kehutanan 1 tahun.
    - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 5 kasus
    - Fasilitasi kerjasama dan 1 kemitraan
  16. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
    - Pemantauan Pemanfaatan hutan 16 kali
    - Pembinaan Perhutanan Sosial 5 lokasi
    - Fasilitasi Pemanfaatan PNBP 5 lokasi
    - Fasilitasi kerjasama dan kemitraan 1 lokasi
  17. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
    - Pemantauan pada areal KPHP yang ada ijin 16 kali
    - Sosialisasi Fasilitasi Izin 3 kelompok
    - Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
    - Fasilitasi kerjasama dan 1 kemitraan
  18. Pemanfaatan dan pengembangan potensi hasil hutan di UPTD TAHURA
    - Pelatihan budidaya madu 2 kelompok
    - Fasilitasi kerja sama dan 1 kemitraan

## **II. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan terdiri dari :**

1. Perencanaan kegiatan pengelolaan KPH, KPHL

- i. Jumlah peta geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan sebanyak 1 peta.
  - ii. Dokumen rencana kehutanan tingkat KPHP dan UPTD Tahura sebanyak 1 dokumen
2. Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan di dinas Kehutanan
  - i. Mengikuti pameran dan update data pembangunan kehutanan pada website 2 kali pameran
3. Pemantapan dan evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
  - i. Jumlah laporan RAD-GRK 1 dokumen
4. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit I Kerinci
  - i. Informasi promosi produk kehutanan 1 kegiatan.
5. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit II dan III Bungo
  - i. Inventarisasi berkala dan penataan hutan 1.647 ha
  - ii. Jumlah perluasan akses informasi dan perpetaan 1 laporan.
6. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit IV,V dan VI Merangin
  - i. Jumlah Penyusunan RPHJPD 1 Dokumen
  - ii. Inventarisasi Potensi Jasa Lingkungan dan HHBK 1 Kali.
  - iii. Pameran kehutanan 1 kali.
7. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit VII Hulu Sarolangun
  - i. Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 laporan.
8. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit VIII Hilir Sarolangun
  - i. Potensi Kelestarian Hutan yang ada di KPHP 1 Kali.
9. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit IX Tebo Barat
  - i. Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 laporan.
10. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit X Tebo Timur
  - i. Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 laporan
11. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XI dan XII Batanghari
  - i. Inventarisasi berkala dan penataan hutan 96,25 ha

- ii. Fasilitas Penandaan tanda batas IUPHH Perhutanan Sosial 5 IUPHH PS.
- iii. Fasilitas pengecekan hasil cruising pada IUPHH Perhutanan Sosial 3 IUPHH PS.
- iv. Panjang tingkat penegasan batas luar dan batas blok pada wilayah KPHP 17,60 Km.
- v. Jumlah peta tematik dan peta areal kerja kphp 12 Lbr
- vi. Indeks perluasan akses informasi dan perpetaan kawasan hutan
- 12. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XIII Muaro Jambi
  - i. Perluasan akses layanan informasi dan perpetaan 1 laporan
- 13. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XIV Tanjung Jabung Timur
  - i. Pelacakan batas luar kawasan hutan 20 Km
  - ii. Sosialisasi Batas Luar Kawasan Hutan 1 kali
  - iii. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan 1 tahun
- 14. Pengelolaan kawasan hutan di KPHP unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
  - i. Jumlah perluasan akses informasi dan perpetaan 1 laporan
- 15. Pengelolaan kawasan hutan di UPTD TAHURA
  - i. Indeks rasionalisasi wilayah kelola 1 Tahun.

### **III. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan terdiri dari :**

- 1. Pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
  - i. Monitoring SDM dan Sarpras Pengendalian Karhutla 11 KPHP, 1 TAHURA, 21 Perusahaan Pemegang Izin Konsesi Kehutanan dan 5 Pengelola PS.
- 2. Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
  - i. Pelaksanaan Patroli Pengamanan Hutan dan peredaran Hasil Hutan 20 kali.
  - ii. Rapat koordinasi pengamanan Hutan 18 kali.
  - iii. Pelaksanaan Sosialisasi peraturan TIPHUT 2 kali.

- iv. Pelaksanaan Pemasangan Papan Larangan TIPHUT (sosialisasi) 10 kali.
- 3. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
  - i. Pelaksanaan Temu Penyuluh Kehutanan 1 kali
  - ii. Lomba Wanalestari yang terlaksana 1 kali
  - iii. Pembinaan/Monev/Supervisi penyuluhan Kehutanan 11 kali
  - iv. Pelaksanaan kegiatan sekolah lapang yang difasilitasi oleh penyuluh kehutanan 2 kegiatan
  - v. Fasilitasi peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan 2 kelompok
  - vi. Luas demplot Tanaman Kehutanan yang difasilitasi penyuluh 3 Ha
  - vii. Penyuluh Kehutanan yang terfasilitasi dalam kegiatan temu penyuluh 41 orang penyuluh kehutanan.
- 4. Evaluasi pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Jambi
  - i. Jumlah pemegang IPPKH/ kerjasama penggunaan Kawasan Hutan yang dievaluasi pemenuhan kewajibannya 2 Pemegang IPPKH/ Kerjasama penggunaan Kawasan Hutan.
  - ii. Permohonan ippkh/ Kerja sama Penggunaan Kawasan Hutan yang dilaksanakan orientasi / Pemeriksaan Lapangannya 2 permohonan IPPKH/ Kerjasama penggunaan Kawasan Hutan.
- 5. Fasilitasi Penanganan Konflik dalam kawasan hutan
  - i. Jumlah konflik yang diselesaikan sebanyak 6 konflik
  - ii. Pendataan potensi konflik tenurial pada Hutan Adat di Provinsi Jambi 4 Ha di Provinsi Jambi.
- 6. Pemantapan Kawasan Hutan

- i. Pelaksanaan Sosialisasi tata pengelolaan kawasan hutan untuk terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap kawasan hutan 150 orang.
- 7. Konservasi kawasan esensial (bernilai ekosistem penting) dan keaneka ragaman hayati di 11 KPHP, UPTD Tahura dan Dinas Kehutanan
  - i. Jumlah identifikasi kawasan esensial 11 KPH
  - ii. Rumah Anggrek 1 Unit
- 8. Sosialisasi pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan
  - i. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan terbakar 6 kali
  - ii. Pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar 5 kali
  - iii. Pelatihan pembentukan Masyarakat Peduli Api 2 kali
- 9. Groundcheck Hotspot (Pengecekan titik panas) Kebakaran Hutan dan Lahan
  - i. Pelaksanaan Groundcheck Hotspot (Pengecekan titik panas) dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 180 kali
- 10. Kampanye pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
  - ii. Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan di media sebanyak 4 media
  - iii. Apel siaga pencegahan kebakaran hutan dan lahan 1 kali
  - iv. Kaji banding praktek terbaik pencegahan kebakaran hutan dan lahan 1 kali.
- 11. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
  - v. Pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebanyak 27 kali.
- 12. Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan

- vi. Penyediaan sarana prasarana penunjang pengendalian kebakaran hutan dan lahan 1 unit mobil, 10 unit pompa, 2 unit laptop
13. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit I Kerinci
- vii. Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 23 kali
  - viii. Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan 1 tahun
10. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit II dan III Bungo
- i. Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  - ii. Koordinasi pengamanan hutan 1 tahun
  - iii. Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan 1 tahun.
11. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit IV,V dan VI Merangin
- Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 22 kali
  - Koordinasi pengamanan hutan selama 1 tahun
  - Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan selama 1 tahun
12. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit VII Hulu Sarolangun
- Fasilitasi konflik dalam kawasan hutan selama 1 tahun
  - Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 22 kali
13. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit VIII Hilir Sarolangun
- Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
14. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit IX Tebo Barat

- Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 15 kali
  - Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan selama 1 tahun
15. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit X Tebo Timur
- Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 20 kali
  - Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan selama 1 tahun
16. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XI dan XII Batanghari
- Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sebanyak 20 kali
  - Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan sebanyak 5 kali
17. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XIII Muaro Jambi
- Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 20 kali
  - Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan selama 1 tahun
18. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XIV Tanjung Jabung Timur
- Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan 1 tahun
  - Kegiatan pemberdayaan masyarakat 2 izin
  - Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan selama 1 tahun
  - Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 2 kali
19. Pengamanan dan perlindungan hutan di KPHP unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
- Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan selama sebanyak 20 kali

- Fasilitasi penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan selama 1 tahun
20. Pengamanan dan perlindungan hutan di UPTD TAHURA
- Patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan selama sebanyak 22 kali

#### **IV. Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

1. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
  - Pengadaan bibit/benih tanaman kehutanan yang berkualitas 10.000 batang
  - Rumah bibit 1 unit
2. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
  - IPPKH yang difasilitasi untuk RHL 43 Izin
  - Pengendalian RHL 12 UPTD (KPHP dan TAHURA)
  - Sosialisasi Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Reklamasi dan Rehab DAS 1 Kali
3. Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
  - Lokasi kegiatan movev pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Jambi 11 UPTD KPHP
4. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I
  - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan Tahun I 5 Ha
  - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku
  - Luas Penanaman di luar kawasan hutan 71 Ha
5. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
  - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan Tahun I 5 Ha
  - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku
  - Luas Penanaman di luar kawasan hutan 12 Ha
6. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI.

- Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan Tahun I 5 Ha.
  - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
  - Luas Penanaman di luar kawasan hutan 12 Ha.
7. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun.
    - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
    - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
    - Luas Penanaman di luar kawasan hutan 12 Ha.
  8. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun.
    - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan tahun I 10 Ha dan 5 Ha.
    - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
    - Luas Penanaman di luar kawasan hutan 25 Ha.
  9. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX.
    - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
    - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
  10. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X.
    - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
    - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
  11. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII.
    - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
    - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
  12. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII.
    - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
    - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
  13. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV.
    - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.

- Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
- 14. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII.
  - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
  - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.
- 15. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD TAHURA.
  - Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan 5 Ha.
  - Rancangan Teknis Kegiatan 1 Buku.

## **V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan jasa surat menyurat 8.000 surat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - Pembayaran Honor PNS dan Non PNS 75 Orang.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Jasa pihak ke-3 outsourcing cleaning service 1 tahun.
5. Penyediaan alat Tulis Kantor
  - Penyediaan alat tulis keperluan kantor 1 tahun.
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan barang cetak blanko dan fotocopy 1 tahun.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan komponen penerangan kantor 1 tahun.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 tahun.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Penyediaan konsumsi rapat dan tamu 1 tahun.
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- Pelaksanaan perjalanan dinas untuk menghadiri undangan rapat dan koordinasi 1 tahun.
11. Operasional rutin UPTD KPHP Unit I Kerinci
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
  12. Operasional rutin UPTD KPHP Unit II dan III Bungo
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
  13. Operasional rutin UPTD KPHP Unit IV,V dan VI Merangin
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
  14. Operasional rutin UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
  15. Operasional rutin UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
  16. Operasional rutin UPTD KPHP Unit IX Tebo Barat
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
  17. Operasional rutin UPTD KPHP Unit X Tebo Timur
    - Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
    - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
  18. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XI dan XII Batanghari

- Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
  - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
19. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XIII Muaro Jambi
- Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
  - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
20. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
- Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
  - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
21. Operasional rutin UPTD KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung Jabung Barat
- Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
  - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.
22. Operasional rutin UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
- Penyediaan ATK, Penggandaan dan Keperluan Kantor lainnya 1 tahun.
  - Fasilitasi Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi 1 tahun.

## **VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor 1 tahun.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1 tahun.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 tahun.

## **VII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  - Penyediaan Pakaian Dinas untuk ASN Dinas Kehutanan.

## **VIII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal
  - Fasilitasi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Penatausahaan Keuangan dan Aset
  - Pengelolaan Keuangan 1 tahun.
  - Pengelolaan Aset 1 tahun.

## **IX. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Realisasi Ikhtisar Kinerja SKPD.
  - Dokumen DPA, Renja, LKJ, Laporan Tahunan Kehutanan, LPPD, DPPA, DIPA, Renstra dan Laporan Kinerja A 8 Dokumen.
  - Rapat Koordinasi 1 Kali.
2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
  - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Kehutanan 1 Dinas dan 12 UPTD.
  - Buku Statistik Dinas Kehutanan dan 12 UPTD 1 Buku.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai berikut :

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan Pilihan					
	Bidang Urusan Pemerintahan					
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	<b>Program Pengelolaan Hutan</b>	<i>Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Asli Daerah/PAD</i>	Dinas dan UPTD	0,20%	28.117.003. 660	APBD
		<i>Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi</i>	Dinas dan UPTD	1,58%	-	APBD
		<b>Persentase Penurunan Laju Deforestasi</b>	Dinas dan UPTD	0,83%	-	APBD
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Dinas)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Rencana Tata Hutan di KPH	Dinas	65,00%	210.000.00 0	APBD

					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan	Dinas	64,66%	300.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	200.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD

					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk operasional kantor	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	210.000.000	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD

					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD
					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur XIV)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD

					Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat XV, XVI dan XVII)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	30%	210.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (Dinas Kehutanan)	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Dinas	70%	100.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD

					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	40.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	-	50.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	-	-	APBD

					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	-	50.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD
					(UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)					
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD

					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	70%	50.000.000	APBD
					Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	Dinas	40%	80.000.000	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Dinas Kehutanan)	Persentase peningkatan pemanfaatan di Kawasan Hutan	Dinas	50%	2.243.449.240	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Lokasi pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola KPH dan Masyarakat	Dinas	7 Lokasi	147.000.000	APBD

					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Hutan	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	-	147.000.000	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan Operasional KPH	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	35%	2.266.000.000	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase fasilitas pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi	UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	40%	148.482.100	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	50%	830.340.000	APBD
					Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tebo Barat Unit IX)	Persentase Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Areal Kemitraan KPH	UPTD KPHP Tebo Barat	11%	300.000.000	APBD

				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tebo Timur Unit X)	Persentase Pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	49%	169.739.450	APBD
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Pemanfaatan di kawasan Hutan Produksi	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	50%	167.033.000	APBD
				Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase fasilitasi pengembangan perbenihan dan pembinaan dalam rangka rehabilitasi	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	-	320.000.000	APBD
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tanjab Timur Unit XIV)	Persentase sistem penerbitan pelayanan perizinan dalam pengolahan HHBK	UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	47%	235.000.000	APBD
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP (Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase pengendalian izin usaha atau kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi kerjasama dan jumlah lahan yang direhabilitasi	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII	45%	1.655.000.000	APBD

					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (Dinas)	Persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi di luar kawasan hutan	Dinas	24%	475.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	Luas tutupan lahan yang bertambah	UPTD KPHP Kerinci Unit I	60 Ha	652.100.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Luas Rehabilitasi Lahan kritis di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	30 Ha	778.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	4,58%	180.500.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun	1,70%	188.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Peningkatan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	30%	230.200.000	APBD

					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Jumlah penyediaan bibit tanaman kehutanan/ kebun bibit tanaman kehutanan	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	30%	333.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	55%	188.000.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	55%	360.500.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	55%	360.500.000	APBD
					Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XIV, XV dan XVI)	Persentase Peningkatan Tutupan Lahan kritis di luar kawasan hutan	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XIV, XV dan XVI	60%	208.000.000	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Dinas)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	Dinas	0,83%	3.481.850.000	APBD

					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Kerinci Unit I)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Kerinci Unit I	0,83%	729.174.250	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	0,83%	706.897.650	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	0,83%	862.424.250	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangu n	0,83%	628.944.250	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangu n	0,83%	713.322.500	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	0,83%	381.797.000	APBD

					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	0,83%	297.400.000	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	0,83%	477.400.000	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	0,83%	555.000.000	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tanjung Timur Unit XIV	0,83%	872.112.000	APBD
					Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV,XVI dan XVII)	Persentase penurunan Laju Deforestasi	UPTD KPHP Tanjung Timur Unit XIV	0,83%	1.116.297.00 0	APBD
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Dinas)	Persentase Pengawasan Perizinan Berusaha HHBK dan Pelaksanaan Identifikasi Potensi HHBK	Dinas	20%	63.099.100	APBD

					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah kelompok yang dibina dalam pengolahan dan Pemasaran HHBK	UPTD KPHP Kerinci Unit I	6 KTH	137.500.000	APBD
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Jumlah Usaha Produktif HHBK yang dilakukan KTH	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangun	3 KTH	105.000.000	APBD
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Jumlah kelompok yang dibina dalam pelatihan pengolahan HHBK	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XIV, XV dan XVI	-	-	-
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (Dinas)	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun	Dinas	45%	100.000.000	-
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam pengolahan hasil hutan kayu	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	64%	218.294.340	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase peningkatan kepatuhan peredaran hasil hutan kayu pada Industri Hasil Hutan	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	50%	45.000.000	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X

					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase peningkatan kepatuhan pelaku industri primer hasil hutan memenuhi tata usaha kayu legal	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	47%	61.455.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi <6000 M3/Tahun (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Penertiban Pemegang Izin dalam pengolahan hasil hutan kayu	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	60%	100.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
					Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase pengadaan, sertifikasi dan pengawasan perbenihan	Dinas	35%	399.000.000	Dinas
					<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM NYA</b>	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya	Dinas	0,2%	3.185.000.000	Dinas
					Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	UPTD Tahura Taman Hutan Raya	55%	1.985.000.000	UPTD Tahura Taman Hutan Raya

					Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES (Convention on international Trade In Endangered Species) Untuk kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pembinaan dan perlindungan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar untuk kewenangan daerah	Dinas	55%	300.000.000	Dinas
					Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan pelestarian alam	Persentase pelaksanaan peningkatan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	Dinas	55%	900.000.000	Dinas
					Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang di kelola oleh masyarakat secara optimal	Dinas	20%	7.746.104.340	Dinas
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan social	Dinas	41,62	1.229.600.000	Dinas
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan social	UPTD KPHP Kerinci Unit I	41,46%	568.747.355	-

					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	25,26%	1.470.307.465	Bio CF/ APBD
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	31,45%	1.142.963.865	Bio CF/ APBD
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangun	34,75%	300.000.000	UPTD KPHP Limau Unit VI Hulu Sarolangun
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	32,65%	812.134.400	UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	27,85%	280.000.000	UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX

					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X	27,85%	260.885.255	UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII	27,85%	322.000.000	UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	27,85%	300.000.000	UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	27,85%	287.483.000	UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV
					Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII)	Persentase Peningkatan Produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit Unit XIV, XV dan XVI	27,85%	771.983.000	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit Unit XIV, XV dan XVI
					<b>Program Pengelolaan Aliran Daerah Sungai (DAS)</b>	Persentase lembaga pengelolaan DAS yang dibentuk	Dinas	12%	226.894.000	UPTD KPHP Tanjab Barat Unit Unit XIV, XV dan XVI

					Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam 1 Daerah Provinsi	Jumlah kesiapan kelembagaan persiapan rehabilitasi DAS Pendataan Lahan Kritis	Dinas	4 Dokum en	80.000.000	APBD
--	--	--	--	--	---	--	-------	------------------	------------	------

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun Keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2016 - 2021 sehingga tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk menerapkan kinerja yang baru dan benar – benar yang tepat sasaran. Target kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dicantumkan dalam RPJMN Republik Indonesia dan juga Provinsi Jambi Khususnya Dinas Kehutanan berkaitan dengan Tingkat Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jambi terutama target capaian penurunan titik api dan peningkatan luas kawasan hutan yang tertutup pohon dan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca, sehingga dengan terwujudnya target capaian tersebut visi dan misi pembangunan kehutanan di Provinsi Jambi dapat diwujudkan.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja hendaknya dapat diselesaikan secara arif dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan *good governance* yang lebih baik dimasa mendatang.

Untuk lebih mengefektifkan fungsi dan kompetensi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2016-2021, maka dipandang perlu upaya peningkatan terhadap capaian kinerja pada berbagai tahapan kegiatan, program, dan kebijaksanaan antara lain melalui ;

1. Optimalisasi kerjasama internal lingkup kehutanan dan eksternal lintas instansi,
2. Optimalisasi dan efektifitas alokasi anggaran berupa dukungan dana serta jumlah maupun kemampuan/ profesionalisme SDM bagi upaya pencapaian kinerja sesuai kondisi objektif.

3. Peran serta dari pihak lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan perlu ditingkatkan untuk menunjang kegiatan bidang kehutanan

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 ini dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam melaksanakan Program Kerja Tahunan guna mewujudkan keberhasilan visi dan misi kedepan, yang sekaligus dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.